

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN KLATEN

“Studi pengecoran logam di Kecamatan Ceper”

Oleh:

Sulistyo Ady Purnomo

(14010110130125)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/ Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

In an era of global competition is increasingly fierce and open a phenomenon that must be faced by businesses to produce products that have a strong competitiveness and competitive price products. MSMEs as one of the supporting force of the movement of domestic trade and driving economic development has a very important role and is crucial in order to improve regional and national economies, So to encourage the presence of these UMKM need a policy that supports UMKM in order to develop, and can help economic growth. As Klaten district in empowering the UMKM sector, metal cast into one of the local revenue contributor.

This study used a qualitative method is to conduct a survey and interviews with the cast metal yng businesses located in the village of Batur subdistrict Ceper Klaten to obtain data on the role of government in enabling businesses of cast metal which decreased.

The results showed that of the answer businessmen about government's role in the Klaten district policy UMKM sector, especially in the village of Batur cast metal Ceper District of Klaten District overall has been going well, but there are some indicators which businesses are still not good and not in accordance expectations. From the results of this study appear several solutions to improve local government services to entrepreneurs Klaten cast metal. To improve the success rate of these policies certainly Klaten District Government, Cooperative Batur victorious and the business must work in synergy.

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan industri kecil dan menengah dapat terjadi dengan keberpihakan dari pemerintah sehingga pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi dapat terwujud. Telah diketahui bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) membantu perekonomian suatu daerah baik kota maupun kabupaten di Indonesia. UKM bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah namun juga dapat menjadi wadah untuk meratakan suatu pendapatan dalam suatu kabupaten/kota, hal ini data dilihat dengan banyak sektor Industri Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak orang dengan banyak usaha. Tantangan berbeda di alami oleh pemerintah daerah banyak disibukkan dengan masalah yang beragam di daerah seperti kemiskinan sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberdayakan kelompok masyarakat miskin.

Sejak era orde baru sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang begitu pelik sehingga dengan banyaknya UKM yang baru muncul dan yang bertahan dari kerasnya proses industri kecil dan menengah akan dapat mengurangi sedikit demi sedikit kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut Schmitz (Ananda 2003), UKM mampu tumbuh lebih cepat dari usaha besar bila diberi peluang. Kehadiran UKM yang tangguh dapat menjadi motivator serta juga dapat menjadikan inspirasi bagi kalangan masyarakat yang menginginkan berwirausaha.

UKM bukanlah usaha yang dimiliki oleh kalangan atas saja namun berdampak positif bagi suatu Negara yang sedang berkembang dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki usaha yang tidak harus berebut pekerjaan dengan ribuan orang dimana lapangan pekerjaannya sendiri semakin terbatas.

UKM sendiri mempunyai suatu efektifitas dalam penyerapan tenaga kerja yakni dengan banyaknya UKM yang bermunculan maka dibutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, secara otomatis pengurangan jumlah pengangguran juga akan menjadi solusi ampuh mengatasi masalah sosial. Jika UKM ini dapat bertahan dan terus berkembang maka penyerapan pengangguran akan terus berlangsung.

Adanya suatu kebijakan dari pemerintah untuk UKM akan sangat berdampak pada kelangsungan UKM itu, seperti yang diungkapkan oleh George J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206), bahwa “Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”.

Manfaat suatu kebijakan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pengusaha sendiri. Dari sisi pemerintah, kebijakan akan memberikan suatu perlindungan keadaan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dari sisi pengusaha, kebijakan akan sangat berguna baik dari segi perizinan yaitu bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan

diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya.

Pemerintah dapat membimbing UKM melalui lembaga-lembaga negara seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh.

Menurut Tulus Tambunan (2002) seperti yang dikutip oleh Choirul Djahhari (2004: 522), “Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan”. Jadi, di Indonesia kebijakan UKM masih berorientasi kepada sosial daripada pasar atau persaingan sehingga kebijakan yang diambil belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro.

Untuk memajukan UKM pemerintah telah menerbitkan program melalui Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Di Kabupaten klaten terdapat banyak jenis UKM salah satunya adalah yang berbasis pada pengecoran logam, tepatnya di Kecamatan Ceper yang memiliki

peranan sangat penting dalam perekonomian di Kecamatan Ceper pada khususnya dan Kabupaten Klaten pada umumnya.

Sentra industri pengecoran logam di Kabupaten klaten merupakan industri yang berkembang di lokasi beberapa desa. Industri pengecoran logam di kecamatan Ceper menghasilkan komponen mesin dan peralatan pabrik, alat-alat pertanian, komponen otomotif dan peralatan rumah tangga. Industri pengecoran logam di Kecamatan Ceper pada tahun 2012 mempunyai 6 jumlah kelompok industri dan mempunyai 300 unit usaha serta memiliki 4850 tenaga kerja.

Dari data tersebut dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja oleh industri pengecoran logam di Kecamatan Ceper mempunyai peranan yang cukup vital bagi perekonomian di daerah itu. Industri pengecoran logam ini telah ada sejak abad ke-19. Bermula dari alat-alat pertanian tradisinonal (mata bajak), alat-alat rumah tangga, hingga kini beralih ke produk lain (mesin pelumat tanah liat (mollen), alat press genteng, sambungan pipa, pompa air, dan lain-lain) dan barang antik (hiasan dinding, lampu robyong, lampu jalan, lampu taman, meja kursi, pagar atau tralis, dan lain-lain), kemudian juga produk komponen mesin (komponen mesin tenun, komponen mesin bermotor (sparepart), komponen kereta api (blok rem), komponen mesin diesel, komponen alat listrik dan produk sejenis lainnya). Untuk menilai kualitas produk yang dihasilkan telah didirikan Laboratorium Pengecoran Logam Ceper yang melayani uji pasir cetak, kekerasan, kekuatan tarik, struktur mikro dan analisa komposisi kimia logam.

Pada tahun 1998 tepatnya saat terjadi krisis moneter di Indonesia membuat industri pengecoran logam di Kabupaten Klaten mengalami masa sulit dalam keberlangsungannya, banyaknya pengusaha yang bangkrut membuat kemunduran industri ini. Bahan baku seperti kokas dan *pig iron* yang harus di impor juga menjadikan masalah tersendiri karena pada awalnya dengan tradisional.

Tepatnya pada Oktober 2002 Usaha cor logam menurun dengan adanya penurunan permintaan menyusul terjadinya krisis ekonomi global dan membludaknya produk-produk cor logam dari Cina dengan tawaran harga jauh lebih murah. Pada Desember 2004 Briket kokas sebagai bahan baku industri cor logam langka, industri cor mengalami kemunduran lagi,

Pada Juli 2005 fluktuasi nilai tukar rupiah atas dolar AS membuat pengusaha cemas. Sebagian besar kokas sebagai bahan bakar diimpor dari China dan pembeliannya menggunakan dollar AS. Oktober 2005 harga bahan baku melonjak pascakenaikan harga BBM. Harga rongsoan baja dan kokas sekarang ini masing-masing mencapai Rp 2.900/kg dan Rp 4.500/kg. Padahal, sebelum harga BBM melambung, harga kedua bahan baku tersebut hanya sekitar Rp 2.400/kg dan Rp 3.800/kg.

Serta pada Februari 2007 Kurang lebih 50% pengusaha cor logam di Batur, Ceper, kolaps menyusul sulitnya mendapat bahan baku dan permodalan. Dari perkembangannya tersebut industry pengecoran logam yang semakin parah dan terpuruk akibat kurangnya bahan baku dan penurunan permintaan pasar.

B. PEMBAHASAN

B.1 Implementasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten Sektor pengecoran logam di Kecamatan Ceper

Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III disebut model kebijakan publik *Direct and Indirect on Implementation*. Kriteria keberhasilan implementasi dalam teori Edwad III terdapat empat variabel yang menentukan yaitu : Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resource*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*). Berikut adalah Variabel Edwards III berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten Khususnya Industri Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper :

a. Komunikasi

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan agar dapat maksimal maka dibutuhkan peran aktif dari setiap stakeholder, begitu pula yang coba dilakakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dimana dalam memajukan UMKM yang ada di klaten. Sektor industri pengecoran logam yang menjadi salah satu penyumbang PDRB terbesar dan menjadi tumpuan guna memajukan perekonomian di Kabupaten Klaten.

Disperindagkop dan UMKM di kabupaten Klaten selalu berusaha dalam menjaga komunikasi dengan para pelaku usaha pengecoran logam, baik secara langsung maupun melalui koperasi yang ada di Kecamatan Ceper yang bernama Koperasi Batur jaya. Koperasi Batur Jaya yang menjadi wadah dari para Pelaku

Industri Pengecoran Logam akan menjadi penghubung ke Disperindagkop dan UMKM kabupaten Klaten

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek yang begitu penting dalam menunjang implementasi sebuah kebijakan, ini dikarenakan seakuratnya sebuah komunikasi serta ketentuan yang begitu jelas tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik jika tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber daya kebijakan dalam Teori Edward III ini meliputi sumber daya manusia atau staff pelaksana kebijakan, sumber daya wewenang dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Begitu juga dengan kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten khususnya Industri pengecoran logam di desa Batur

c. Disposisi

Kebijakan dalam tahapan implementasi dapat dikatakan berhasil maupun tidaknya proses implementasi tidak terlepas dari peranan pelaksana. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pelaksana kebijakan mengetahui dengan benar apa yang harus dikerjakan serta dalam setiap pelaksana memiliki kemampuan untuk memahami prosedur mengenai standard an tujuan kebijakan yang akan di implementasikan.

Pengawasan yang dilakukan berkala akan berdampak pada efektifitasnya kinerja para pelaksana kebijakan dengan setiap pelaksana memiliki kemampuan yang baik. Pengawasan terhadap sebuah pelaksanaan akan membuat standard dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetap terjaga

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemberdayaan industri pengecoran logam ini diperlukanlah sebuah komitmen yang tinggi serta kejujuran dan sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan ini

B.2 Faktor Penghambat Atau masalah Yang Ditemui

Setelah melihat berbagai faktor pendukung yang ada, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam di Kabupaten Klaten dari berbagai informasi dan temuan yang ada di lapangan sebagai berikut :

1. Daya saing yang rendah dari pelaku usaha pengecoran logam ini membuat kurangnya jiwa wirausaha muncul sehingga usahanya kurang bisa berkembang
2. Pangsa pasar menurun, ini disebabkan karena daya saing antar pengusaha yang rendah menyebabkan pangsa pasar yang rendah dan ketertarikan pembeli menurun
3. Harga dan pasukan bahan tidak stabil menyebabkan kejenuhan dari pengusaha karena keuntungan yang tidak menentu

4. Kontrol kualitas terbatas yang disebabkan kualitas SDM yang belum mumpuni yang disebabkan karena tidak memenuhi dalam prosedur yang telah ditetapkan.
5. Keterbatasan modal yang merupakan masalah klasik dalam pengembangan usaha sehingga dibutuhkan bantuan permodalan modal.
6. Kerentanan dalam kerjasama sehingga dibutuhkan sebuah kerjasama yang jelas dan transparan.
7. Belum ada aturan hukum yang jelas dan lebih spesifik sehingga diperlukan perda tentang kebijakan UMKM di Kabupaten Klaten
8. Masih belum optimalnya kinerja para pelaksana kebijakan pemberdayaan UMKM karena terlalu banyaknya sektor UMKM lain yang perlu diperhatikan
9. Manajemen pelaku usaha masih buruk masih dibutuhkan solusi dalam pengelolaan dan manajemen pengecoran logam dalam usaha kecil yang didominasi oleh usaha rumah tangga.

PENUTUP

C.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pemberdayaan UMKM sektor Pengecoran Logam di Desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Diperindagkop dan UMKM kabupaten Klaten sebagai pelaksana kebijakan, adapun dalam pemberdayaan dilakukan dua tahapan yaitu : Pencerahan yang dilakukan untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melakukan usaha dan yang kedua Pemberian Daya merupakan bentuk dari upaya pemerintah daerah melalui Disperindagkop dan UMKM Kab Klaten memberikan sebuah suntikan berupa bantuan sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha baik berupa kemampuan SDM dan ketrampilan maupun anggaran.
2. Secara umum implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor Pengecoran Logam di Kabupaten Klaten berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha cor logam. Disposisi atau sikap pemerintah terhadap pelaku usaha dalam hal ini para pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab Klaten sebagai pelaksanan kebijakan memiliki komitmen tinggi dan baik dalam melaksanakan kebijakan serta memajukan Pengecoran logam di Desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Serta adanya struktur birokrasi yang jelas dalam melaksanakan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebijakan akan berjalan dengan baik.
3. Faktor yang mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam adalah Terdapat komitmen yang tinggi dari pihak

pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha pengecoran logam, sehingga berbagai kelemahan dari pelaku usaha akan dikelola sebaik mungkin oleh Disperindgkop dan UMKM sebagai ujung tombaknya. Keseriusan dan semangat yang tinggi dari para pelaksana kebijakan untuk memberdayakan sektor pengecoran logam yang didukung dengan komitmen yang tinggi juga dari para pelaksana

4. Sedangkan kelemahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM sektor Pengecorn Logam di Desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten adalah Daya saing yang rendah dari pelaku usaha pengecoran logam ini membuat kurangnya jiwa wirausaha muncul sehingga usahanya kurang bisa berkembang. Pangsa pasar menurun, ini disebabkan karena daya saing antar pengusaha yang rendah menyebabkan pangsa pasar yang rendah dan ketertarikan pembeli menurun. Serta dari Harga dan pasukan bahan tidak stabil menyebabkan kejenuhan dari pengusaha karena keuntungan yang tidak menentu dan Kontrol kualitas terbatas yang disebabkan kaulitas SDM yang belum mumpuni yang disebabkan karena tidak memenuhi dalam prosedur yang telah ditetapkan

C.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam di Desa Batur Kcamatan

ceper Kabupaten Klaten. Rekomendasi langkah-langkah yang mungkin diambil sebagai berikut :

1. Perlunya regulasi dari pemerintah dalam bahan baku pengecoran logam untuk mengatasi sulitnya bahan baku maupun regulasi dari harga bahan baku yang tegas. Serta pemerintah harus memberikan alternatif penyediaan bahan baku agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya tanpa terkendala masalah bahan baku.
2. Evaluasi bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha mengenai pelaksanaan kebijakan ini, agar dapat mengetahui apa saja yang diharapkan dan diinginkan oleh pelaku usaha. Sehingga pemerintah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan dapat menemukan solusi yang baik serta kebijakan tersebut akan berjalan baik untuk masa mendatang.
3. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam usaha ini maka pemerintah harus sigap dimulai dari pembuatan Perda yang mengatur dan menjelaskan UMKM di Kabupaten Klaten. Dibuatkan sebuah pusat pemasaran agar poduk pengecoran logam dapat lebih mudah dalam bidang pemasaran.
4. Pihak pemerintah harus terus memberikan kebijakan-kebijakan untuk memajukan sektor insudtri pengecoran logam maupun sektor UMKM lain, yang akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Klaten sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

Ansel Strauss & Juliet Corbin, Muhammad Shodiq & Imam Muttaqim, 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Dr Mas Roro Lilik Ekowati. 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evluasi Kebijakan atau Program”*Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis*”.Surakarta: PUSTAKA CAKRA SURAKARTA

Drs. AG Subarsono Msi, MA, 2005. Analisis Kebijakan Publik “*Konsep, Teori dan Aplikasi*”. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR

Erwan Agus Purwanto Ph.D dan Dyah Ratih sulistyastuti, M.Si, 2012. Implementasi Kebijakan Publik ” *Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*”. Yogyakarta: PENERBIT GAYA MEDIA

Haris Herdiansyah M.Si, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Indihono, dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : berbasis *Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : PENERBIT GAYA MEDIA

Prof. Dr. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

P. Joko Subagyo, S.H. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA

Winarno, budi. 2007. Kebijakan Publik : teori & proses. Yogyakarta: PT. BUKU KITA

Peraturan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis yang dicadangkan untuk Usaha Kecil DAN Bidang /Jenis Usaha yang terbuka untuk Usah Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usah Kecil dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pembangunan Usaha Kecil
5. Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usah Milik Negara Nomor Per 05/mbu/2007 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dngan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Peraturan Daerah KabupatenKlaten tentang organisaisi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten
9. RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015
10. Peraturan Bupati Klaten No. 49 Tahun 2008 tentang 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Klaten

Internet :

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html> di akses pada 17 April 2013 07.18 WIB

<http://alfianhayqal.wordpress.com/author/alfianhayqal/page/4/> diakses pada 18 April 2013 10.19 WIB

<http://klatenonline.com/> di akses pada 09 April 2013 pada 17.05 WIB